

IDEOLOGI ISLAM SEBAGAI SOLUSI PROBLEMATIKA DALAM DUNIA PENDIDIKAN

Mahnan Marbawi
SMPN 280 DKI Jakarta
E-mail: marbawi1973@gmail.com

Abstract

Educational problems must be taken on. The various negative impacts of modern life have to be minimized by human life sectors, including education. This article explains how education has constantly basis for thinking in every educational process. In addition, it also examines Islamic ideology in achieving educational goals, especially in realizing the five responsibilities as its task. This is because education cannot be separated from ideology. Whatever the educational model, it always has an ideological content. Education as a tool to preserve an ideology is clearly part of the social change process. Ideology is defined as the person or people perspective in understanding social reality. The color of ideology in education which is based on two perspectives, they are the formal system perspective and the empirical process perspective brings up three classifications of educational ideology, they are dichotomous, trichotomic and six groups. Meanwhile, the educational ideology in Islam prioritizes the individual as the main focus. This because of the importance of education to build soul, mind and piety. The purpose of education in Islam is focused on the individual's ability to be able to be responsible for five things, such as responsibility to Allah SWT, to himself, to society, to act and uphold justice and responsibility to nature.

Keywords: ideology, education, Islam

Abstrak

Problematika pendidikan merupakan suatu hal yang harus dihadapi. Berbagai dampak negatif kehidupan modern harus diminimalkan oleh berbagai sektor kehidupan manusia, termasuk pendidikan. Artikel ini menjelaskan bagaimana pendidikan juga memiliki landasan berpikir yang tetap dalam setiap proses pendidikan. Di samping itu juga mengkaji ideologi Islam dalam mencapai tujuan pendidikan, terutama dalam mewujudkan lima tanggung jawab yang menjadi tugasnya di bumi. Ini karena pendidikan tidak bisa lepas dari ideologi. Apapun model pendidikannya selalu memiliki muatan ideologis. Pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan sebuah ideologi jelas menjadi bagian dari proses perubahan sosial. Ideologi didefinisikan sebagai cara pandang seseorang atau sekelompok orang dalam memahami realitas sosial. Warna ideologi dalam pendidikan yang didasarkan atas dua pandangan perspektif sistem formal dan perspektif proses empiris, melahirkan tiga klasifikasi ideologi pendidikan, yaitu dikotomis, trikotomis dan enam kelompok. Sedangkan ideologi pendidikan dalam Islam lebih mengutamakan individu sebagai fokus utama. Ini didasari atas pentingnya pendidikan untuk membangun jiwa, akal dan ketakwaan. Tujuan pendidikan dalam Islam difokuskan kepada kemampuan individu untuk mampu bertanggungjawab kepada lima hal, yaitu tanggung jawab kepada Allah Swt, tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab untuk berbuat dan menegakkan keadilan serta tanggung jawab kepada alam.

Kata Kunci: ideologi, pendidikan, Islam

Pendahuluan

Setiap sikap atau perspektif seseorang selalu memiliki landasan atau argumentasi yang melatarbelakangi sikap atau perspektifnya tersebut. Ini artinya seseorang memiliki landasan berpikir yang menjadi penyebab dari semua aktivitasnya.

Landasan berpikir inilah yang menjadi pijakan dalam bersikap dan berperilaku serta berpikir. Pijakan berpikir seseorang ini menjadi bagian dari pengaruh ideologi atau pandangan yang relatif tetap yang dimiliki seseorang atau masyarakat.

Berbagai problematika yang sedang dihadapi pendidikan Indonesia, di satu sisi, sebenarnya bermuara kepada semakin jauhnya manusia dari titik *axis* dalam dirinya. Manusia modern lebih banyak memberikan porsi waktu dan perhatian kepada berbagai masalah yang bersifat normatif-teknis, dari pada harus memikirkan ulang hal-hal yang lebih prinsip dan fundamental. Karena memiliki paradigma pemikiran seperti ini, maka manusia modern belum mampu menemukan jati diri secara utuh. Kondisi ini berujung kepada semakin dirasakan dampak dari adanya *something lost* dalam dirinya.

Melalui pemahaman seperti ini, diprediksi peran agama pada masa mendatang (*post-modern*) semakin signifikan. Sehingga kejayaan era agama pada Periode Pertengahan dapat menjadi *new spirit* untuk menjawab *split personality* yang dialami manusia modern. Kebangkitan era agama, tentu saja, diiringi dengan kebangkitan-kebangkitan dalam bidang lain, seperti biologi, kebudayaan, globalisasi ekonomi, nasionalisme kultur, swastanisasi negara sejahtera, kepemimpinan wanita, kebangkitan wilayah Pasifik dan sikap individualisme.¹

Problematika pendidikan merupakan suatu hal yang harus dihadapi dan tidak boleh dihindari. Berbagai dampak negatif kehidupan modern harus diminimalkan oleh berbagai sektor kehidupan manusia modern, termasuk pendidikan. Jika hal ini mampu dipahami secara cermat, maka yang menjadi tugas sekarang adalah upaya menampilkan pendidikan dalam konteks modern dengan visi baru yang mampu berperan aktif dan memiliki kontribusi signifikan dalam kancah modernitas. Dengan demikian, upaya merenungkan dan mencermati kembali terhadap substansi pendidikan yang dilaksanakan selama ini merupakan suatu keharusan, baik meliputi filsafat, teori maupun kurikulum

¹ Uraian lebih lanjut tentang prediksi ini, baca John Naisbitt dan Patricia Aburdence, *Megatrend 2000* (London: Sidwick, 1990).

pendidikan.² Hal ini perlu memperoleh tekanan lebih mengingat ketiganya adalah variabel yang harus ada dalam proses pendidikan, yang berfungsi memberikan arah dan model dari pendidikan.

Artikel ini menjelaskan bagaimana pendidikan juga memiliki landasan berpikir yang relatif tetap dan dimasukkan, baik secara terang-terangan atau tersembunyi, dalam setiap proses pendidikan. Di samping itu juga mengkaji ideologi Islam dalam mencapai tujuan pendidikan, terutama dalam mewujudkan lima tanggung jawab yang menjadi tugasnya di bumi ini.

Pembahasan

A. Ideologi dalam Pendidikan

Istilah ideologi sering didengar dan didiskusikan secara intens. Dalam pandangan yang umum dikenal istilah ideologi sebagai sesuatu yang berhubungan dengan keharusan berpedoman terhadap apa yang disebut ideologi tersebut, termasuk di dalamnya adalah agama. Namun demikian ideologi berbeda dengan agama. Dimana agama (*samawi*) berawal dari wahyu, sementara ideologi berasal dari pemikiran filosofis manusia yang dilembagakan dan diyakini. Ada banyak ideologi dalam sejarah perkembangan sosial masyarakat, seperti Marxisme,³ Fasisme, Liberalisme dan lain sebagainya. Beberapa di antaranya telah punah atau tidak muncul serta hanya menjadi bagian dari sejarah (Fasisme), beberapa di antaranya telah bermetamorfosis dan beberapa di antaranya masih eksis hingga saat ini. Ideologi yang bermetamorfosis yang dimaksud penulis adalah ideologi yang mengalami perkembangan pemikiran dan melahirkan beberapa kajian keilmuan baru, seperti Marxisme yang melahirkan Marxisme strukturalis, Marxisme sosialogis atau agama sebagai ideologi melahirkan berbagai aliran dalam wacana pemahaman keagamaan.

Dalam konteks kelanggengan suatu ideologi tersebut, bisa dilihat adanya watak keabadian dari sebuah ideologi. Istilah watak keabadian adalah untuk menunjukkan suatu ideologi akan

² Ali Maksum dan Luluk Yunan Ruhendi, *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern* (Yogyakarta: Ircisod, 2004), 283.

³ Ernesto Laclau, *Political and Ideology in Marxist Theory* (London: NLB, 1977), 81.

terus berkembang dan memberikan pengaruh signifikan dalam proses kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, pemerintahan, pendidikan dan tentu dalam mengatur tata hubungan antar manusia bahkan antar bangsa. Watak keabadian sebuah ideologi muncul ketika terjadi diskursus ilmiah yang melahirkan pengembangan perspektif akademis terhadap ideologi tersebut.

Di atas disebutkan ada beberapa ideologi yang langgeng, ada yang bermetamorfosis menjadi berbagai turunan kajian dan diskursus keilmuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah pemikiran, ideologi akan terus berkembang selama masih ada penganut dan kajian intensif yang terus-menerus melakukan dialog dan mencari idealisasi dari implementasi ideologi tersebut. Inilah yang kemudian menjadikan sebuah ideologi memiliki watak “keabadian.”

Artinya sebuah ideologi akan terus berkembang manakala para penganut ideologi tersebut terus-menerus melakukan upaya pencarian akademik dan ilmiah dalam menerapkan struktur keilmuan ideologi tersebut dalam kehidupan praksis. Sebagai contoh, Marxisme sebagai sebuah ideologi melahirkan struktur praksis dalam kehidupan politik menjadi politik kelas *proletar-borjuis* atau Marxis strukturalis dan sosiologis.⁴ Ideologi Liberalisme melahirkan struktur ekonomi kapitalis, pasar bebas dalam praksis kehidupan ekonomi dan seterusnya. Inilah yang menunjukkan watak keabadian sebuah ideologi tersebut. Lalu apa yang dimaksud dengan ideologi?

Istilah ideologi memberikan pengaruh terhadap apa yang bisa diterima sebagai sesuatu yang salah atau yang benar, khususnya ketika sebuah ideologi dianggap relevan bagi sekelompok orang -bisa negara, organisasi atau individu. Dalam konteks ini ideologi beroperasi baik secara keseluruhan dalam struktur sosial, sebagai alat memonitor kehidupan sosial, konflik

⁴ Marxis strukturalis dan sosiologis didasarkan pada konsep dialektis Karl Marx pada metodologi dialektisnya, dimana Karl Marx melihat relasi sosial berdasarkan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. George Litzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi dari Klasik hingga Post Modern* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 45-48 dan 336-342.

perjuangan, ketidaksetaraan dan pada tingkat lokal memonitor praktik sosial dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Secara etimologis, kata ideologi berarti *set of (political) beliefs* “,⁶ *the body of ideas characteristic of a particular individual group or culture, the assertions, theories and aims that constitute a political, sosial, and economic program*.⁷ Ideologi, ketika ditafsirkan dalam pemaknaan secara kritis, melalui relasi antara ide-ide pemikiran dengan konteks sosial yang ada, memiliki empat kemungkinan pemaknaan. Pertama, ideologi adalah format pemikiran yang secara keliru telah melakukan pendistorsian terhadap realitas sosial dan berupaya mencari pemikiran alternatif yang pada umumnya bersifat simbolik untuk menyelesaikan kontradiksi sosial yang terjadi dan secara sadar mengabaikan solusi yang sesungguhnya. Kedua, ideologi adalah kombinasi dari semua bentuk kesadaran sosial, seperti hukum, filsafat, etika, seni dan lain sebagainya. Ketiga, ideologi adalah ide-ide politik yang secara sederhana dianggap berasal dari kelas sosial atau ekonomi tertentu, misalnya seperti ideologi borjuis. Keempat, pemikiran *post-strukturalis*⁸ telah menggunakan unsur-unsur dari ketiga definisi di atas untuk membangun sebuah teori ideologi sebagai sistem penafsiran, representasi, pemaknaan atau cerita, yang mendefinisikan kemungkinan eksistensinya pada semua lini kehidupan dan semua individu. Aliran pemikiran post-strukturalis berawal dari pemikiran strukturalis Lavi Strauss (pada persoalan budaya) dan Ferdinand de Saussure (pada persoalan linguistik), yaitu sebuah paham atau keyakinan bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini mempunyai struktur, bekerja secara struktural. Post-strukturalisme merupakan kritik terhadap

⁵ Teun A. Van Dijk, *Ideologi a Multidisciplinary Approach* (London: SAGE Publication, 1998), 8. Baca juga Andrew Heywood, *Political Ideologies: An Introduction* (London: Palgrave, 2011), 1-6.

⁶ *Oxford Learner's Pocket Dictionary* (Oxford: Oxford University Press, 1992), 206.

⁷ Merriam-Webster, *Webster's Complete Dictionar* (New York: Smith & Clark, 1995), 255.

⁸ Dominique Rio Adiwijaya, “Semiologi, Strukturalisme, Post-Strukturalisme dan Kajian Desain Komunikasi Visual?” *Jurnal Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2011), 803-813.

paham strukturalisme. Post-struktural memiliki ciri khas kritik terhadap subjek manusia, kritik terhadap historisme, kritik terhadap makna dan kritik terhadap filsafat. Perbedaan strukturalisme dengan post-stukturalisme adalah (1) strukturalis melihat kebenaran berada di balik atau dalam suatu teks, sementara postrukturalisme menekankan interaksi pembaca dengan teks sebagai suatu produktivitas, (2) strukturalisme menjelaskan adanya hubungan antara penanda dan petanda yang cenderung stabil, poststrukturalisme sangat kritis terhadap kesatuan yang stabil antara penanda dengan petanda, petanda dapat menjadi penanda, (3) kritik terhadap subjek yang terpadu, pengarang sebagai kesadaran asli. Kesadaran menurut pstrukturalisme distrukturkan melalui bahasa.⁹

Ideologi identik dan selalu terkait dengan persoalan pemikiran politik, doktrin dan teori yang dibutuhkan untuk menguatkan sebuah ide sebagai sebuah doktrin. Lebih jauh Andrew Heywood menjelaskan bahwa tidak ada satu definisi pun yang *seattle* atau disepakati secara menyeluruh terkait ideologi. Ketiadaan kesepakatan yang umum terkait definisi ideologi sendiri bisa dilihat dari beragamnya definisi ideologi. Ada banyak definisi ideologi yang dikemukakan oleh para pakar, seperti dijelaskan David Mc Lellan ideologi adalah ilusi konsep dari keseluruhan ilmu pengetahuan sosial.¹⁰

Beberapa pakar menyebutkan bahwa definisi ideologi adalah merujuk kepada sebuah landasan berpikir individu atau kelompok orang yang menjadi dasar atau argumentasi dalam perilaku kehidupan sosialnya. Ideologi juga bisa menunjukkan sebuah cara pandang seseorang atau sekelompok orang dalam memahami realitas sosial.¹¹ Definisi lain ideologi adalah landasan teoretik dan pandangan filosofis yang memberikan arahan operasional. John B Thompson memandang bahwa ideologi merupakan

⁹ Luluk Muasomah, "Relasi Ideologi dan Pendidikan," *al-Mabsut*, Vol. 6 No. 1 (2013), 255.

¹⁰ Andrew Heywood, *Political Ideologies*, 5.

¹¹ Khalian, "Meninjau Kembali Ideologi dan Paradigma Pendidikan Nasional," <http://khalian21.blogspot.com/2010/11/menin-jau-kembali-ideologi-dan-paradigma.html>, 24/08/2018.

sebuah sistem simbol yang memiliki korelasi kuat dengan tindakan sosial.¹²

Meighat yang dikutip Indra Bastian dan Olivia mendefinisikan ideologi sebagai sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan dan ide-ide yang diselenggarakan oleh sekelompok orang sebagai sebuah sistem percakapan dan perilaku sebuah masyarakat. Sistem ini dianggap sebagai sebuah cara atau hal yang benar oleh kelompok masyarakat tersebut sebagai cara untuk memahami realitas dunia.¹³ Secara etimologis kata ideologi berarti “*set of (political) beliefs*”, *the body of ideas characteristic of a particular individual group or kulture, the assertions, theories and aims that constitute a political, sosial, and economic program*.¹⁴

Graham C Kinloch menyatakan bahwa ideologi digunakan untuk menjustifikasi tindakan sekelompok orang.¹⁵ Artinya dalam kerangka sosial, ideologi digunakan sebagai pembenaran atas aksi-aksi kolektif dengan simbol-simbol opini atau simbol ideologi untuk mempengaruhi opini publik.¹⁶ Ideologi juga dimaknai oleh Kenneth Tucker sebagai sistem kultural untuk membangun kultur politik dan mengembangkan identitas kolektif dan solidaritas.¹⁷

Sedangkan menurut Ali Shariati, pemikir modern muslim dari Iran, ideologi merupakan pandangan seseorang terhadap realitas sosial yang dihadapinya. Ali Shariati membedakan ideologi yang merupakan kesadaran kritis tentang ide, dengan ilmu pengetahuan yang merupakan kesadaran realitas eksternal ideologi

¹² John B. Thompson, *Analisis Ideologi* (Yogyakarta: Ircisod, 2003), 127. Baca juga Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 165-167.

¹³ Indra Bastian dan Olivia Idrus, “Paradigma Baru Manajemen Pendidikan,” *Modul Akutansi Pendidikan*, 1-49.

¹⁴ Merriam-Webster, *Webster's Complete Dictionar*, 255.

¹⁵ Graham C. Kinloch, *Ideology and the Sosial Science* (London: Greenwood Press, 1981), 78.

¹⁶ William A. Gamson, “Political Discourse and Collective Action,” dalam B. Klandermans, H. Kriesi dan S. Tarrow, ed., *From Structure to Action: Comparing Sosial Movements Across Kutures* (Greenwich, CT: International Sosial Movement Research, JAI Press, 1988), 219.

¹⁷ Kenneth H. Tucker, “Ideological and Sosial Movements: The Contributions of Habermas,” *Sociological Inquiry*, Vol. 59, No. 1 (1989), 30-48.

dan melibatkan *judgement de fait* dan *judgement de valeur*. Menurutnnya ideologi berkaitan dengan konseptualisasi *world view* yang memerlukan pemahaman kritis terhadap persoalan sosial yang dihadapi dan mempengaruhi interaksi antara manusia.¹⁸

Agama pun dianggap sebagai sebuah ideologi. Ali Shariati mendefinisikan ideologi Islam sebagai ideologi yang sempurna untuk mengatasi problem-problem masyarakat karena menawarkan solusi konkrit untuk masalah hidup sehari-hari, dan hal ini berakar dalam kesadaran historis masyarakat muslim.¹⁹ Ideologi akan mengalami transformasi dari kesadaran epistemologis menjadi kesadaran ontologis masyarakat. Transformasi ini terjadi ketika ideologi berakar pada kesadaran historis masyarakat. Karena itu transformasi Islam dari ideologi menuju budaya dapat dipahami dalam konteks ini.²⁰ Berbeda dengan Ali Shariati, Dede Rosyada menjelaskan bahwa agama lebih besar dari pada ideologi. Dalam konteks ideologi, Pancasila adalah bagian dari agama. Ini dibuktikan dengan *compatibilitas* atau kesesuaian nilai-nilai Pancasila dengan nilai agama.

Lebih jauh Ali Shariati menjelaskan ideologi terkait nilai-nilai yang diperjuangkan sebagai sebuah pandangan hidup dan diyakini oleh masyarakat memiliki beberapa tahapan. Pertama adalah lingkungan budaya sosial terbentuk dari cara pandang masyarakat dalam memaknai perilaku alam semesta dan eksistensi manusia. Hal ini juga akan membentuk mentalitas dari sebuah kebudayaan masyarakat. Kedua adalah sebagai alat dengan berbagai metode dan pendekatan untuk menyampaikan interpretasi ketidakpuasan terhadap *status quo*.²¹ Pada tahap inilah ideologi berfungsi sebagai penunjuk arah, tujuan dan cita-cita serta rencana praktis untuk melakukan perubahan dan kemajuan sosial yang diharapkan.²²

¹⁸ Ali Shariati, *Culture and Ideology* (Texas: Free Islamic Literature, 1980), 43. Baca juga Ali Shariati, *Man and Islam* (Texas: Free Islamic Literature, 1981), 82-85.

¹⁹ William Montgomery Watt, *Islam and Integration of Society* (London: Routledge & Kegan, 1961), 53-56.

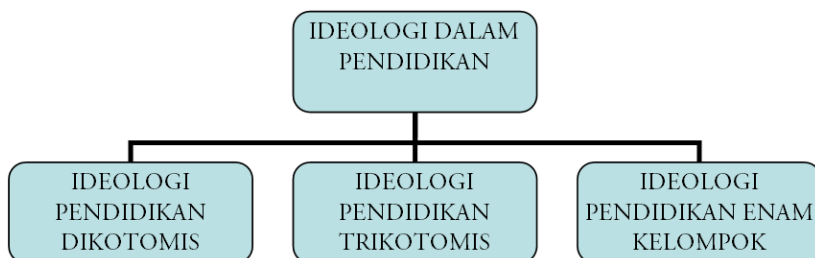
²⁰ Ali Shariati, *Culture and Ideology*, 55.

²¹ Firdaus Syam, *Pemikiran Politik Barat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 242.

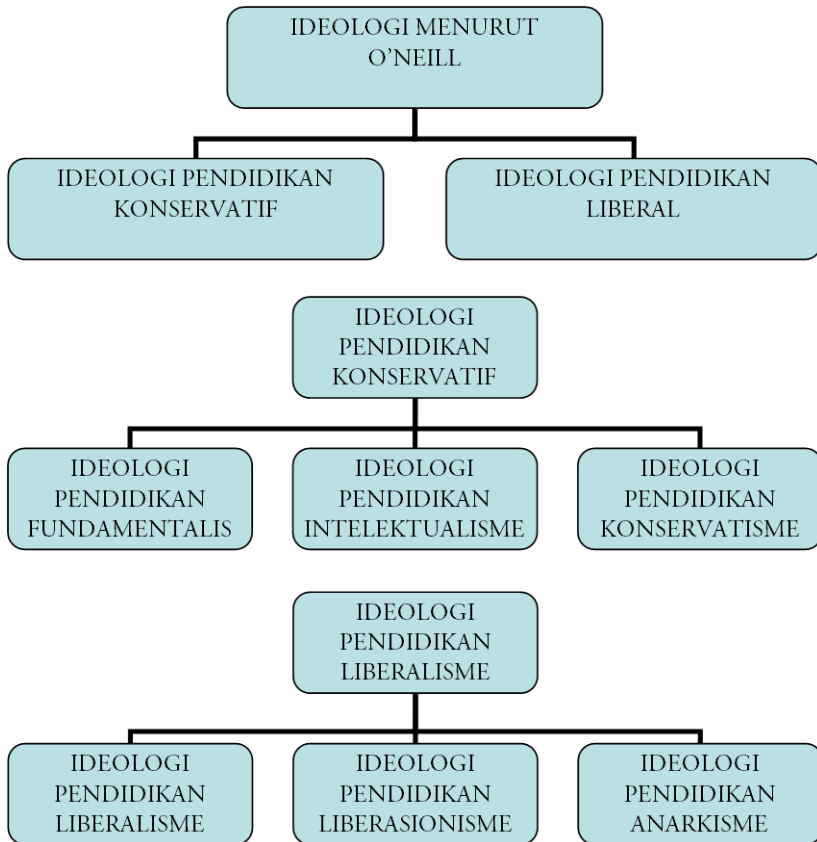
²² Ali Shariati, *Tugas Cendekiawan Muslim* (Yogyakarta: Salahuddin Press, 1982), 148.

Definisi terkait ideologi di atas tidak bisa dilepaskan dari ideologi politik (kekuasaan) dan memberikan pengaruh terhadap pendidikan, di mana dalam pendidikan selalu memiliki muatan ideologi yang kuat, tergantung siapa yang mengoprasikan pendidikan tersebut. Terkait ideologi dalam pendidikan ini menarik mencermati tulisan Karti Soeharto. Dalam makalahnya Karti menjelaskan bahwa perdebatan ideologi pendidikan bermuara kepada perdebatan konseptual aliran atau perspektif formal dan perspektif empiris. Dalam perspektif sistem formal, kajian filsafat umum mendominasi sistem dan pemikiran pendidikan. Model ini menguasai pemikiran ideologi pendidikan sejak tahun 1950-an. Kebalikan dari pemikiran perspektif formal, dalam pandangan empiris atau problematis, menolak pendekatan filsafat dalam proses pendidikan. Justru pendekatan empiris problematis dan rasional menjadi alternatif pemikiran ideologi pendidikan yang dianut sejak tahun 1960-an.

Warna ideologi dalam pendidikan yang didasarkan atas dua pandangan di atas-perspektif sistem formal dan perspektif proses empiris, melahirkan klasifikasi ideologi pendidikan. Terdapat tiga klasifikasi ideologi dalam pendidikan: dikotomis, trikotomis dan enam kelompok. Klasifikasi dikotomis meliputi ideologi pendidikan konservatif dan liberal, atau realistik dan idealistik. Klasifikasi trikotomis meliputi ideologi pendidikan tradisional, progresif dan radikal atau konservatif, liberal dan kritis. Sementara yang enam kelompok adalah ideologi fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, liberalisme, liberasionisme dan anarkhisme (radikalisme).



O'Neill dalam bukunya *Educational Ideologies; Contemporary Expressions of Educational Philosophies* membagi ideologi pendidikan menjadi dua kelompok.²³



Ideologi pendidikan fundamentalisme bersifat anti-intelektual dan bercorak konservatif. Model ideologi fundamentalis-konservatif -anti-intelektual ini, mengedepankan penerimaan terhadap apa yang sudah diwahyukan dan atau kesepakatan sosial yang sudah mapan tanpa pertimbangan filosofis atau rasional intelektual. Ada dua variasi sudut pandang dalam penerapan ke dalam pendidikan. Pertama adalah ideologi pendidikan fundamentalisme *religious*. Ini bisa dilihat dari model pendidikan puritan yang meneguhkan dominasi wahyu dalam semua aspek kehidupan, yang kemudian melahirkan pemikiran dominasi wahyu dan tertutupnya pemikiran kritis ijtihad. Dalam konteks

pendidikan Islam bisa dilihat dari gerakan kembali kepada al-Qur'an dan hadits yang dikembangkan oleh golongan puritan Salafi-Wahabi. Atau dalam pendidikan versi Kristen yang lebih fundamentalis, apa yang diwahyukan hanya boleh di tafsirkan oleh otoritas atau kewenangan Alkitab. Adanya batasan tafsir tersebut menyebabkan pandangan yang kaku dan harfiah terhadap kenyataan dan teks wahyu itu sendiri. Kedua adalah pandangan ideologi pendidikan fundamentalisme akal sehat yang diwakili dengan penekanan yang kuat terhadap nasionalisme dan patriotisme.

Pendidikan dalam pandangan ideologi konservatisme, memandang dengan rasa hormat terhadap tatanan sosial dan hukum yang telah baku, dengan cara mendukung ketaatan terhadap proses budaya yang telah terlembaga dan teruji waktu. Hal ini sebagai landasan bagi perubahan sosial yang konstruktif. Sekolah dalam pandangan konservatis sebagai wahana untuk meneruskan struktur dan sistem sosial berikut dengan tradisi yang sudah mapan untuk kemudian dilestarikan melalui pendidikan. Ideologi pendidikan konservatisme memiliki dua model pendekatan. Pertama adalah pendekatan religius dalam pendidikan (ideologi pendidikan konservatisme religius), dimana rujukan utama dalam landasan pembentukan watak moral adalah pelatihan rohani menekankan pelatihan rohani. Dalam konteks Indonesia bisa dilihat dalam sistem pendidikan di pesantren. Kedua adalah pendekatan sekuler dimana pendidikan diarahkan sebagai upaya untuk memastikan kemampuan sosial untuk bertahan hidup dan mengembangkan keefektifan personal dengan penguatan pada pelestarian dan penyaluran keyakinan serta praktek-praktek nyata. Inilah yang disebut ideologi pendidikan konservatisme sekuler.²⁴

Pendidikan yang pembelajarannya diarahkan agar siswa mampu menghadapi kehidupan dengan segala persoalan secara efektif dengan tujuan untuk melestarikan sekaligus menguatkan tatanan sosial yang telah mapan. Model pendidikan seperti ini

²³ William F. O'neill, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2008).

²⁴ Karti Soeharto, "Perdebatan Ideologi Pendidikan," *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol. 14 No. 2, (2010), 134-137.

yang diinginkan oleh ideologi pendidikan liberal. Dalam pelaksanaannya, ideologi pendidikan liberal ini memiliki model yang berbeda-beda. Mulai dari model pendidikan liberalisme metodik model Maria Montessorimo, liberalisme direktif atau mengarahkan dengan rujukan muatan filosofi John Dewey, hingga ke liberalisme non-direktif atau liberalisme *laissez faire* dalam pandangan Carl Rogers atau AS Neill.²⁵

Ideologi pendidikan liberasionisme menganggap bahwa kebebasan individual menjadi hal utama dalam proses pendidikan sekaligus untuk mempromosikan perwujudan potensi-potensi personal menjadi tujuan dari pembaruan pendidikan dalam tatanan politis. Sebagai contoh gerakan-gerakan menuntut hak-hak warga negara di Amerika Serikat era 1960-an menjadi contoh model pembaruan pendidikan liberalisme konservatif. Atau model pendidikan liberalisme yang cenderung revolusioner dan bernuansa Marxis yang mendorong pendidikan sebagai model yang berperan aktif dalam perubahan tatanan politik.

Sekolah dalam pandangan ideologi pendidikan liberasionisme, tidak sentralistik, harus rasional dan ilmiah serta objektif. Dalam pandangan kelompok ideologi liberasionisme, sekolah sangat berfungsi ideologis. Sekolah diarahkan tidak hanya mengajar siswa untuk berpikir rasional-ilmiah dan efektif, sekaligus mendorong daya kritis siswa dalam melihat kebijakan sosial yang berkaitan dengan problem kemasyarakatan secara efektif. Sekolah memberikan fasilitasi kepada siswa untuk mengenali masalah sosial dan mempromosikan penyelesaian yang konstruktif dengan program sosial yang didasarkan atas argumentasi yang analitis dan obyektif terhadap fakta sosial yang ada. Model pembelajarannya bisa merujuk kepada model *problem based learning* (PBL).

Senada dengan liberasionisme adalah anarkis yang memandang kebebasan manusia dan menyediakan peluang sebesar-besarnya atas berkembangnya potensi manusia dari kekangan kelembagaan pendidikan atau pun kelembagaan sosial. Tokoh yang mendukung ideologi anarkis adalah Ivan Illich dan Paul Goodman.²⁶ Dalam

²⁵ William F. O'Neil, *Educational Ideologies* (California: Goodyear Publishing Company, 1981), 66.

²⁶ Ibid, 113.

prakteknya ideologi anarkis ini muncul dalam model anarkisme taktis yang mendorong peleburan sekolah untuk mewujudkan adanya sistem sosial yang baru. Ada juga model anarkisme utopis yang menginginkan sebuah masyarakat yang bebas dari keterbelengguan kelembagaan sosial apapun.²⁷

Sementara berdasarkan pemikiran Henry Giroux dan Arnowitz tentang ideologi pendidikan terbagi tiga, yaitu konservatisme, liberalisme dan kritis. Ideologi konservatis menekankan pandangannya bahwa masyarakat tidak bisa merencanakan perubahan, hanya Tuhan-lah yang mampu menentukan keadaan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk merubah kondisi mereka. Orang-orang miskin, buta huruf, tertindas adalah nasib yang mereka buat sendiri, karena salah mereka sendiri, karena masih banyak orang lain yang ternyata bisa bekerja keras dan sukses. Harmoni dan keseimbangan penting dalam masyarakat untuk menghindari konflik. Sementara ideologi liberal berpandangan bahwa ada masalah (sosial, politik dan ekonomi) dalam kehidupan masyarakat, tetapi pendidikan tidak berkaitan dengan itu semua. Pendidikan tidak memiliki tugas yang berkaitan dengan persoalan politik dan ekonomi.²⁸ Pemikiran pendidikan yang berbasis ideologi liberal memisahkan secara tegas antara persoalan pendidikan dan kehidupan sosial ekonomi dan politik. Dalam pandangan liberal, pendidikan hanya berkaitan dengan mengembangkan potensi dan pengetahuan siswa untuk menghadapi kehidupannya serta bertumpu pada kebebasan individu untuk bisa menciptakan perubahan yang dihadapi siswa.

Ideologi pendidikan kritis didasarkan atas pemikiran Paolo Freire, yang menjelaskan bahwa kesadaran manusia terdiri atas tiga tahap. Pertama adalah kesadaran magis, yang terbentuk karena manusia tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dengan faktor lainnya. Hal ini disebabkan karena pendidikan tidak memberikan basis analisis kritis terhadap problem yang dihadapi baik secara sistem dan struktural. Pemikiran magis juga

²⁷ Karti Soeharto, "Perdebatan Ideologi," 138.

²⁸ Fisip Universitas Airlangga, "Ideologi-Ideologi dalam Pendidikan", web.unair.ac.id/admin/file/f_32373_sospen8.pptx 24/08/2018.

melandasi kekuatan di luar diri manusia sebagai penyebab kuat atas ketiakberdayaan manusia dan hal ini disebabkan oleh pendidikan dogmatis yang tidak memberikan ruang mekanisme untuk memahami “makna” dari setiap konsep kehidupan masyarakat.

Kedua adalah kesadaran naif yang bertumpu kepada manusia sebagai penentu segala kejadian dalam kehidupan. Manusia dalam konteks pendidikan mengedepankan pada etika (baik-buruk, rajin-malas, kaya-miskin, beruntung-sial dan lain sebagainya), kreativitas, *need for achievement*, yang kesemuanya dianggap sebagai penentu perubahan sosial sehingga lebih menekankan pada *man power development* sebagai kunci perubahan sosial. Ketiga adalah kesadaran kritis yang bertumpu kepada sistem dan struktur yang menjadi sumber masalah, bukan manusianya. Pendidikan difungsikan untuk dapat menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta didik mampu melibatkan diri pada proses penciptaan struktur yang lebih baik. Anggota masyarakat memperoleh kesadaran kritisnya sebagai hasil dari pendidikan, dengan cara (1) penguatan pada kemampuan mengidentifikasi ketidakadilan dalam struktur yang ada, (2) kemampuan mentransformasikan sistem dan struktur dengan cara melakukan analisis konteks.

Dalam konteks ideologi pendidikan kritis pendidikan yang ada selama ini sekadar menciptakan keseimbangan sistem atau agar sistem yang ada berjalan baik dan dapat melanggengkan kekuasaan. Pedagogi dianalogikakan sebagai model *Banking Concept of Education* bersifat menjinakkan, dehumanisasi dan penindasan.

Sementara Khalian menyebutkan berbagai macam ideologi berdasarkan pengembangan dari pemikiran William F. O’neil, yaitu ideologi konservatis dan liberal, menjadi beberapa ideologi turunan. Pertama adalah ideologi fundamentalisme, yang meminimalisir daya kritis terhadap konsensus sosial yang telah mapan dan menerima kebenaran atas realitas sosial tanpa pertimbangan filosofis dan intelektual. Kedua adalah ideologi intelektualisme, yang mendorong pendidikan merubah praktek-praktek politik untuk mendukung filosofis intelektual yang otoritarian. Ketiga adalah ideologi konservatisme, yaitu ideologi yang mendorong ketaatan terhadap institusi yang telah teruji

waktu dan penghormatan terhadap tatanan sosial yang konstruktif. Masyarakat menurut golongan konservatisme tidak bisa melakukan perubahan sosial dan ketimpangan yang terjadi dalam struktur sosial masyarakat merupakan hukum alam yang mustahil dihindari. Hal tersebut juga-ketimpangan sosial, merupakan ketentuan sejarah.

Keempat adalah ideologi liberalisme, yang memandang peserta didik sebagai individu yang unik dan memiliki persoalan kehidupan yang berbeda, sehingga pendidikan mendorong pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikannya secara mandiri sesuai dengan pengembangan potensi individu siswa. Tujuan dari ideologi liberalise adalah pelestarian dan penguatan tatanan sosial yang ada dengan mempromosikan perwujudan setiap potensi individu secara maksimal. Kelima adalah ideologi anarkisme, yaitu ideologi pendidikan yang bercita-cita untuk menghapus sistem sekolah yang dianggap sebagai belenggu atas potensi personal dari pembatasan-pembatasan kelembagaan terhadap perilaku personal. Ideologi ini juga bercita-cita menjadikan masyarakat bebas dari belenggu lembaga dengan melakukan *deinstitutionalisasi* masyarakat. Keenam adalah ideologi kritis-radikal, yang menciptakan ruang berpikir serta bertindak untuk selalu kritis terhadap keadaan dan struktur yang tidak adil dan menindas. Tugas utama pendidikan adalah melakukan refleksi kritis terhadap *the dominant ideology* ke arah tranformasi sosial.²⁹

Ada perbedaan pengertian ideologi pendidikan liberal yang dikemukakan oleh O'Neill dengan Giroux dan Arnowitz. Serta ideologi pendidikan anarkis dan ideologis pendidikan kritis Paolo Freir. Ideologi pendidikan liberal O'Neill menekankan kepada menyiapkan anak didik untuk menghadapi persoalan yang akan dihadapinya serta mengusahakan kebebasan individu untuk bisa menciptakan perubahan yang dihadapi anak didik. Sementara ideologi liberal Giroux dan Arnowitz menekankan kepada pemisahan antara pendidikan dengan persoalan ekonomi, sosial dan politik. Liberalisasi dalam pendidikan menurut pandangan Giroux dan Arnowitz melahirkan individualis dan kapitalistik. Sementara

²⁹ <http://khalian21.blogspot.co.id/2010/11/meninjau-kembali-ideologi-dan-paradigma.html>. 25/04/2017.

pemikiran Paolo Freire ini kemudian melahirkan *Critical Pedagogy*³⁰ atau Pendidikan Kritis.

Peran pendidikan dalam pandangan O'Neill lebih memungkinkan keterlibatan individu untuk melakukan perubahan sosial dan menyiapkan individu untuk terlibat dalam proses perubahan sosial. Sementara Giroux dan Arnowitz menekankan kepada bagaimana individu mampu mengatasi persoalan kehidupan dan memenangkannya. Inilah yang kemudian menjadikan pendidikan diarahkan untuk memenuhi dan memenangkan dunia kerja dan pasar bebas kapitalis, *laissez faire*.

Penting untuk melihat pandangan HAR Tilaar terkait pendidikan sebagai bagian dari alat kekuasaan. Menurut Tilaar, ada tiga sifat dalam karakteristik utama pendidikan. Pertama adalah proses pendidikan diarahkan kepada tindakan untuk mencapai sesuatu dalam kerangka partisipasi dengan sesama untuk mewujudkan kemajuan bersama sebagai suatu tindakan performatif. Kedua adalah akuntabilitas tindakan pendidikan diukur dari sampai di mana tindakan tersebut bermanfaat bagi kemaslahatan bersama dan inilah yang dimaknai sebagai reflektif pendidikan. Ketiga adalah sadar terhadap tujuan dari proses pendidikan.³¹

Dalam istilah Pierre Bourdieu sadar tujuan adalah *doxa*. Pierre Bourdieu menjelaskan dua jenis *doxa*, yaitu *doxa intern* dan *doxa extern*.³² *Doxa intern* adalah berkaitan dengan keinginan untuk menjadi seorang individu. Dalam Istilah Poggi, individu itu ingin menyatakan sesuatu dalam dirinya sendiri atau *homopotens*. *Doxa ekstern* adalah pendidikan di arah kepada tujuan kekuasaan ekstern yang tertentu. Yang kedua ini menjadi tujuan dan wilayah penguasa dalam mengarahkan pendidikan sebagai penguatan ideologi negara.³³

³⁰ James D. Kirylo, *A Critical Pedagogy of Resistance* (Rotterdam: Sense Publisher, 2013), 34.

³¹ HAR Tilaar, *Kekuasaan & Pendidikan* (Magelang: Indonesia Tera, 2003), 119. Baca juga HAR Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Grasindo, 2002), 10.

³² Richard Shusterman, *Bourdieu: A Critical Reader* (Oxford: Blackwell Publishers, 1999), 30.

³³ HAR Tilaar, *Kekuasaan & Pendidikan*, 170.

Berdasarkan pandangan tentang ideologi yang erat kaitannya dengan pendidikan dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan tidak lepas dari ideologi. Apapun model pendidikannya selalu memiliki muatan ideologis. Atau sebaliknya siapapun penguasa yang menjalankan sebuah pemerintahan, akan selalu menanamkan ideologi dalam sistem pendidikan yang dijalankannya. Sebab dengan menggunakan ideologi dalam pendidikan adalah bagian dari kelanggengan kekuasaan dan alat untuk mengontrol sistem sosial masyarakat.

Terkait relasi ideologi dengan pendidikan perlu diperhatikan aspek-aspek ideologis dalam pendidikan. Pertama bahwa ideologi umumnya telah melegitimasi praktik-praktik pendidikan. Di mana ketika masyarakat tradisional mulai mengalami perubahan menjadi modern, legitimasi ritualistik pendidikan membuka peluang untuk tipe baru legitimasi ideologis pendidikan. Dalam hal ini terdapat dua atribut penting, yaitu (1) melibatkan munculnya pengakuan atas hak mereka untuk memilih jenis pendidikan yang sesuai dengan selera mereka, nilai-nilai mereka, tujuan mereka, pemahaman mereka dan lain sebagainya. Dalam realisasi pandangan baru ini, mereka tidak lagi merasa wajib untuk mengenyam pendidikan pada lembaga pendidikan negeri yang umumnya membawa legitimasi ideologis tertentu, (2) membutuhkan keberadaan yang simultan dari beberapa konsepsi pendidikan, yang mana peserta didik dan orang tua, dapat dengan bebas memilih jenis pendidikan yang cocok untuk pandangan dunia atau *weltanschauung* peserta didik tersebut. Ini dibuktikan dengan maraknya lembaga pendidikan yang berafiliasi kepada organisasi tertentu, yang memiliki tujuan ideologis untuk menguatkan ideologi kelompok atau ideologi keagamaannya. Dalam penelitian Saparudin menyebutkan lembaga pendidikan semacam Sekolah Islam Terpadu memiliki tujuan ideologis mengembangkan ideologi salafi.³⁴

Kedua bahwa ideologi telah menjadi sistem kognitif dalam pemikiran pendidikan, di mana dalam beberapa hal sistem

³⁴ Saparudin, "Ideologi Pendidikan Dalam Pendidikan: Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok," Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

kognitif membantu manusia untuk menemukan dan menciptakan arti dari dunia dan kehidupan serta untuk mendapatkan orientasi atas perbuatannya. Ideologi adalah sistem kognitif tersebut, bahwa sistem kognitif yang berbeda memenuhi peran yang sama dalam kehidupan manusia, di mana mereka memberikan makna yang berarti bagi kehidupan mereka dan mengarahkan tindakan mereka masing-masing dengan caranya sendiri, dan ini tidak mencakup semua bidang kehidupan. Semua ini merupakan karakteristik dari kelompok sosial dalam berbagai periode sejarah. Dapat melihat dalam sejarah masyarakat tertentu, suatu periode di mana pemikiran magis kadang kala menjadi dominan, dalam pemikiran masyarakat, dan dalam periode lain, justru pemikiran keagamaan, pemikiran ilmiah, atau bahkan dimensi ideologis mungkin lebih dominan. Mengatakan pendidikan dalam fungsi masyarakat modern melalui suatu legitimasi ideologis, dapat berarti dua hal, yaitu (a) ideologi adalah sistem kognitif yang menjelaskan kepada masyarakat esensi dan tujuan pendidikan, dan kriteria yang mana masyarakat dapat memilih jenis pendidikan yang mereka lebih sukai dibanding lainnya, (b) ideologi adalah mekanisme kontrol sosial, yaitu dengan cara tercapainya kesepakatan atau konsensus di kalangan masyarakat tentang cara-cara yang diterima dari praktek pendidikan.

Ketiga bahwa ada pandangan yang mengatakan kalau ideologi dapat mengontrol perilaku masyarakat, tetapi masyarakat tidak dapat mengontrol ideologi mereka. Ideologi, sebagai teori yang paling dominan (jika tidak semua) dari klaim ideology, bertindak sebagai mekanisme kontrol pada tindakan masyarakat dalam kehidupan sosial dan politik. Asumsi dalam teori ini adalah bahwa ideologi dapat mengisi peran mekanisme kontrol ini, salah satunya melalui penelitian ilmiah, pemikiran filosofis atau aksi-aksi pragmatis mereka.

Keempat adanya sebuah proposisi dalam pemikiran pendidikan bahwa semua keputusan-keputusan pendidikan juga adalah keputusan-keputusan yang sifatnya ideologis. Argumen bahwa setiap keputusan pendidikan adalah ideologis dapat terlihat dengan jelas pada semua level kegiatan pendidikan. Misalnya peraturan pemerintah tentang wajib belajar dan durasinya,

tingkat alokasi sumber daya ekonomi untuk pendidikan yang tidak merata di tiap daerah, penyeragaman seragam sekolah untuk semua anak, penyeragaman manajemen kelas atau segregasi budaya yang terjadi di sekolah-sekolah, pendidikan agama untuk seluruh level pendidikan atau bahkan sebaliknya pemisahan agama dari muatan kurikulum pendidikan dan lain sebagainya. Ini semua jelas adalah keputusan ideologis.³⁵

Pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan sebuah ideologi jelas menjadi bagian dari proses perubahan sosial. Berkaitan dengan hal ini, Tilaar menjelaskan bahwa masyarakat dewasa ini merupakan masyarakat yang sadar akan apa yang ingin dicapainya.³⁶ Fungsi sosiologis pendidikan pada dasarnya adalah pewarisan nilai-nilai budaya yang terus dijaga dari generasi tua hingga generasi seterusnya sebagai proses sosialisasi. Pewarisan nilai-nilai budaya suatu bangsa dari generasi ke generasi hanya bisa dilakukan secara efektif melalui pendidikan. Perubahan sosial masyarakat bisa dilakukan melalui pendidikan sekaligus pendidikan juga menjadi instrumen perubahan sosial itu sendiri. Sehingga antara keduanya dan pendidikan terdapat hubungan timbal balik.³⁷

Kentalnya warna ideologis dalam pendidikan, dimana pendidikan sebagai bagian dari alat perubahan sosial, menjadikan pendidikan memiliki berbagai macam aliran dalam menjalankan fungsi pendidikan. Lebih jauh menurut Tilaar³⁸ dalam perkembangan pendidikan dewasa ini, terdapat lima aliran besar. Pertama adalah aliran yang merepresentasikan pendidikan sebagai transmisi kebudayaan dan mempertahankan tatanan sosial yang ada sekaligus memproyeksikan bangunan masyarakat masa depan. Tokoh yang mengusung aliran fungsionalisme dalam pendidikan seperti ini adalah Durkheim dan Parsons. Kedua adalah aliran yang memandang pendidikan sebagai alat atau upaya untuk

³⁵ Luluk Muasomah, "Relasi Ideologi dan Pendidikan," 1-9.

³⁶ HAR Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan*, 480-481.

³⁷ Nanang Rijono, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan* (Malang: Unmer, 2003), 25.

³⁸ HAR Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 40-42.

merekonstruksi kondisi sosial masyarakat atau disebut aliran kulturalisme. Rekonstruksi yang dimaksud dalam aliran kulturalisme ini adalah menata masyarakat berdasarkan fungsi-fungsi budaya universal dengan tetap berbasis budaya lokal dan diarahkan (dikembangkan) menjadi budaya nasional dan budaya global. Tokoh dalam aliran ini adalah Brameld dan Ki Hadjar Dewantara.

Ketiga adalah aliran kritikal. Ada dua kelompok aliran kritikal, yaitu penganut teori konflik dan teori kritikal. Bagi penganut teori konflik, fungsi pendidikan dilihat sebagai reproduksi tatanan ekonomi yang sedang berjalan, untuk mengupayakan pemerataan ekonomi melalui perjuangan kelas. Tokohnya adalah Marx dan Bowels. Sedangkan bagi penganut teori kritikal, fungsi pendidikan adalah memberdayakan kaum tertindas dengan mengembangkan keaksaraan kritikal bagi rakyat banyak. Tokohnya adalah Freire, Gyroux dan Vygotsky. Keempat adalah aliran interpretatif. Tugas pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dalam kurikulum. Untuk masa depan, pendidikan berfungsi menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan antara kelompok elite dan rakyat jelata yang miskin. Tokoh dalam aliran ini adalah Bernstein. Kelima adalah aliran pascamodern atau *postmodern*. Pendidikan masa kini adalah transmisi ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan masyarakat masa depan perlu menghargai kebhinnekaan dan keragaman pendapat. Fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas merumuskan pendapat dan menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Tokoh dalam aliran ini adalah Derrida, Foucault dan Gramsci.

Namun demikian, ada beberapa pakar yang mulai menyangsikan watak keabadian sebuah ideologi. Dimana sebuah ideologi akan mengalami masa suramnya dan masa kematiannya. Arus globalisasi dengan segala muatannya sebenarnya merupakan proses ideologisasi baru. Hal ini biasanya diiringi dengan politik *endism*,³⁹ yaitu sebuah tesis tentang matinya ideologi besar dunia akibat gerusan

³⁹ A. Bakir Ihsan, "Harga Ideologi Ditengah Pasar Globalisasi", <http://bakir.blogspot.com/2006/06/opini-harga-ideologi-di-tengah-pasar.html> 26/08/2018.

kapitalisme yang tidak tertandingi. Negara maju dengan kapitalismenya menyusup melalui stigma *endism*. Kenyataan inilah yang dipromosikan oleh para pemikir *endist* yang tertuang dalam pelbagai karyanya, seperti *the end of ideology* (Daniel Bell) dan *the end of history* (Francis Fukuyama), *the end of the nation state* (Kenichi Ohmae atau Jean-Marie Guehenno) dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, ideologi globalisasi merupakan bentuk paling nyata dari upaya pengakhiran ideologi lainnya, termasuk Pancasila, sehingga memperlancar hegemoni negara maju. Pancasila, tidak tertutup kemungkinan Pancasila, pada akhirnya mati di tengah globalisasi akibat ketidakberdayaan anak bangsa merespon berbagai godaan global (*the end of the Pancasila?*). Berdasarkan uraian ini, jadi ideologi yang mana yang menjadi anutan pendidikan kita?

Sebagai penutup dari diskusi pada bagian ini penulis sampaikan pendapat dari Frans Magnis Suseno terkait katagorisasi ideologi. Pertama adalah ideologi tertutup berkaitan tatanan dan norma-norma sosial politik yang mengatur kehidupan masyarakat. Ideologi tertutup ini melegitimasi elit penguasa atas rakyat dan melakukan dogmatisasi ideologi (ideologisasi) seperti Marxisme-Leninisme. Kedua adalah ideologi terbuka yang bersifat inklusif, tidak totaliter. Ideologi terbuka ini berbeda dengan ideologi tertutup yang bisa digunakan oleh penguasa untuk kepentingannya. Ideologi terbuka tidak bisa digunakan untuk melegitimasi penguasa atau sekelompok orang karena ideologi terbuka hanya menyuguhkan kerangka orientasi dasar. Sedangkan operasional kesehariannya akan selalu berkembang disesuaikan dengan norma, prinsip moral dan perkembangan masyarakat serta cita-cita bersama. Ketiga adalah ideologi sebagai keyakinan akan hakikat realitas dan bagaimana manusia harus hidup dalam keyakinan-keyakinan masyarakat tradisional. Inilah yang kemudian dikenal dengan *local wisdom*. Model keyakinan (ideologi) masyarakat tradisional atau *local wisdom* tersebut sering berdimensi ideologis karena mendukung tatanan sosial yang ada dan melegitimasi struktur non-demokratis tertentu, seperti tetua adat, yang menguasai kelas sosial lain.⁴⁰

⁴⁰ Frans Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 232. Baca HAR Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 79-81.

B. Ideologi Islam dalam Pendidikan

Teori *korespondensi* Bowles dan Gintis⁴¹ yang menyebutkan ada korelasi antara pendidikan yang ditempuh dengan pekerjaan yang diperoleh, menjadikan pendidikan saat ini menjadi sangat komersial dan kapitalistik. Pendidikan dalam model *korespondensi* ini menjadikan pendidikan sebagai alat mobilisasi sosial-ekonomi individu, atau orang tua atau negara.⁴² Tujuan pendidikan sebagai alat mobilisasi sosial ekonomi ini mengakibatkan *patologi psiko-sosial* di kalangan orang tua atau masyarakat, yaitu apa yang disebut *diploma disease* (penyakit diploma), yang merupakan suatu perilaku masyarakat yang memandang sekolah sebagai upaya untuk mengejar nilai-nilai ekonomi dan sosial dengan meraih suatu gelar, bukan karena kepentingan pendidikan itu sendiri.⁴³

Penyakit yang hingga sekarang masih menjangkiti sebagian masyarakat bahkan semakin akut. Kecenderungan masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di lembaga pendidikan yang menawarkan fasilitas dan kepastian kerja menjadi tujuan masyarakat memilih pendidikan. Tuntutan hidup yang menawarkan *life style* berkelas, budaya konsumerisme yang ditawarkan industri kapitalis, yang semua dirancang dan ditawarkan oleh globalisasi menjadikan orientasi pendidikan masyarakat adalah bagaimana mampu meraih kehidupan yang mapan dan terpenuhinya semua kebutuhan hidup setelah selesai pendidikan dengan diterima bekerja diperusahaan yang mampu menawarkan gaji tinggi. Ini berakibat kepada dikejanya berbagai lembaga pendidikan yang menawarkan berbagai fasilitas dan kepastian dunia kerja. Dimana pendidikan itu sendiri adalah bagian dari industri untuk meraih pasar dan tenaga kerja siap pakai.

Diploma Disease terjadi manakala orientasi pendidikan lebih menekankan kepada orientasi kemasyarakatan daripada orientasi kepada individu.⁴⁴ Pandangan teoritis terkait orientasi

⁴¹ Samuel Bowles, "Capitalist Development and Education Structure," *World Development*, Vol. 6 No. 6 (1978), 783-796.

⁴² Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas* (Jakarta: Mizan, 1998), 166. Baca juga HAR Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 2, 64.

⁴³ Ronald Dore, *The Diploma Disease* (London, Goerge Allen, 1976).

⁴⁴ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik*, 163.

kemasyarakatan yang menganggap pendidikan sebagai sarana utama dalam menciptakan masyarakat yang baik, termasuk sistem pemerintahan yang demokratis, oligarkhis maupun monarkis. Penganut pandangan ini meyakini bahwa masyarakat jauh lebih penting daripada individu. Penganut pandangan ini adalah Paolo Freire⁴⁵ yang menekankan perubahan sosial. Penganut pandangan orientasi masyarakat tetap memperhatikan kebutuhan individu siswa meskipun dinomorduakan.

Pandangan yang berorientasi kepada masyarakat ini menjadikan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan masyarakat dan aspek yang mempengaruhinya. Dalam konteks global, pengaruh tersebut adalah globalisasi, ekonomi, kepentingan MNC serta politik penguasa. Maka terjadilah pendidikan sebagai komodifikasi atau komersialisasi pendidikan seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sedangkan pandangan yang berorientasi individu adalah yang lebih memfokuskan diri pada kebutuhan, daya tampung dan minat siswa. Ada dua aliran yang berorientasi kepada individu siswa. Pertama adalah yang berpendapat bahwa tujuan utama pendidikan adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa meraih kebahagiaan optimal melalui pencapaian kesuksesan kehidupan bermasyarakat dan ekonomi. Kedua adalah lebih menekankan kepada peningkatan intelektual, kekayaan dan keseimbangan jiwa peserta didik. Dalam aliran kedua ini memandang siswa memiliki keunikan atau bakat dalam pelbagai segi.⁴⁶

Dua pandangan orientasi pendidikan ini berbeda dalam pandangan ideologi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam lebih mengutamakan individu sebagai fokus utama. Ini didasari atas pentingnya pendidikan untuk membangun jiwa, akal dan ketakwaan. Dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menantang manusia secara individu untuk merenungkan terkait ciptaan Allah Swt, salah satu contohnya adalah dalam QS. al-Ghashiah dan masih banyak ayat dalam al-Qur'an lainnya yang menunjukkan

⁴⁵ David Pratt, *Curriculum Planning* (Frort Worth: Brace College, 1994), 8-13.

⁴⁶ Wan Mohd Nor Wan Daud, *Filsafat dan Praktik*, 165.

tuntutan atau mendorong individu manusia berpikir atas segala ciptaan Allah Swt.

Tujuan pendidikan dalam Islam difokuskan kepada kemampuan individu untuk mampu bertanggungjawab kepada lima hal, yaitu tanggung jawab kepada Allah Swt (QS. al-Dzariyat: 56), tanggung jawab kepada dirinya sendiri (QS. Luqman: 12), tanggung jawab kepada masyarakat (QS. al-Nisa: 36), tanggung jawab untuk berbuat dan menegakkan keadilan (QS. al-Maidah: 8) serta tanggung jawab kepada alam lingkungan (QS. al-Rum: 41). Tujuan pendidikan dalam Islam inilah yang membedakan dengan orientasi ideologi pendidikan kapitalis dan Marxis.

Ketika kapitalis mendasarkan kepada pemenuhan kebutuhan dan orientasi teori *korespondensi*, atau Marxis dan pendidikan kritis yang berorientasi kepada perubahan sosial, atau tujuan pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat seperti pada model kapitalis atau berorientasi individu, maka pendidikan Islam mendedikasikan tujuan pendidikan kepada orientasi spiritual dan sosial. Ini yang membedakan orientasi pendidikan Islam dengan orientasikan ideologi pendidikan kapitalis dan orientasi Marxis. Penekanan orientasi pendidikan Islam adalah tertanamnya lima sikap tanggung jawab dalam diri siswa.

Menanamkan sikap tanggung jawab terhadap Allah Swt menunjukkan orientasi pendidikan Islam adalah didasari oleh orientasi spiritual. Dimana pendidikan dalam Islam menanamkan terlebih dahulu sikap *tauhid* sebagai fondasi dalam diri siswa. Sehingga dalam proses pendidikannya siswa sudah harus dikenalkan dengan jati-dirinya sebagai seorang hamba.

Konsep tanggung jawab terhadap Allah Swt dalam QS. al-Zariyah: 56 ini menekankan kepada kesadaran siswa akan kehadirannya di dunia dan tugas-tugas spiritual yang menjadi tujuan utama kehidupannya. Pemaknaan “beribadah” tidak hanya ibadah yang bersifat *mahdháh*, namun ibadah yang juga *ghairu mahdháh*. Ibadah *mahdhah* adalah ibadah yang berkaitan dengan ritual ibadah seperti shálat, zakat, puasa, haji dan ibadah yang telah ada ketentuan syariat sesuai kaidah jurisprudensi Islam. Sedangkan ibadah *ghairu mahdah* berkaitan dengan ritual ibadah selain salat, zakat, puasa dan haji. Ibadah ini berkaitan dengan

apa yang disebut kesalehan sosial. Ibadah ini juga berkaitan dengan tiga tanggungjawab berikutnya dan berkaitan dengan *hub min al-nas* dan *hab min 'alam*. Ibadah *ghairu mahdháh* ini juga akan berkaitan dengan orientasi pendidikan Islam dalam menanamkan tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, tanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan menjaga lingkungan.

Pemaknaan ibadah sebagai bukti penghambaan manusia kepada Allah Swt tidak hanya sebagai bagian ritual. Dalam konsep pendidikan Islam yang berorientasi tanggung jawab kepada Allah Swt menekankan kepada pemaknaan “penghambaan” kepada Allah Swt, baik melalui ritual yang bersifat *mahdháh* dan *ghairu mahdháh*. Sebagai contoh pemaknaan ibadah shalat, zakat, puasa dan haji serta ibadah yang wajib atau ibadah-ibadah, baik yang wajib atau sunnah lainnya. Pemaknaan ibadah *mahdháh* tersebut tidak hanya sesuatu yang bersifat ritual wajib yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, namun ibadah tersebut memiliki makna sosial yang harus diberikan landasan argumentasi rasional dan spiritual.

Landasan tanggung jawab kepada Allah Swt yang ditanamkan dalam pendidikan Islam menjadi fondasi pertama. Fondasi ini akan menjadi *starting point* dalam pengembangan tujuan pendidikan Islam selanjutnya. Dimana tanggungjawab kepada Allah Swt ini menjadi jangkar utama dari empat pilar lainnya (tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab menegakkan keadilan dan tanggung jawab kepada alam lingkungan). Dari sisi materi pelajar tanggungjawab kepada Allah Swt ini membutuhkan matapelajaran akidah (*tauhid*) dan fikih yang berkaitan dengan ibadah *mahdah*.

Tujuan pendidikan Islam yang pertama ini yaitu tanggung jawab kepada Allah Swt merupakan landasan spiritual bagi manusia. *Starting point* dengan keimanan kepada Allah Swt ini akan menjadi landasan dari pengembangan diri manusia dalam berbagai hal. Dimana ketika melaksanakan semua hal yang menjadi tanggung jawab kemanusiaannya, seorang siswa merujuk sebagai bagian dari pengabdian atau penghambaan kepada Allah Swt. Sehingga diharapkan apa yang menjadi laku, karya,

pikiran dan hasil olah ciptanya memiliki nilai transenden dengan Sang Khalik dan sebagai perwujudan penghambaan dirinya. Sebagai wujud penghambaan, maka manusia akan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan mengerahkan semua kemampuan, daya pikir dan daya ciptanya sebagai persembahan terbaik kepada Sang Khalik. Ini yang diucapkan setiap hamba ketika membaca doa *iftitah* dalam shalat. Di mana doa ini di ambil dari QS. al-An‘am: 162, yaitu *inna shalâtî wa nusukî wa mahyâya wamamatî li allâhi rabbi al-‘âlamîn*. Meskipun dalam prakteknya ikrar manusia yang disampaikannya dalam doa *iftitah* shalat sulit untuk direalisasikan, karena kepentingan manusia pada sesuatu selain Allah Swt lebih besar.

Pilar kedua dari tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan tanggung jawab kepada diri sendiri. Dalam QS. Luqman : 12 ini ada tiga poin utama. Pertama adalah Allah Swt telah mengajarkan kepada manusia, yang diwakili oleh Luqman, tentang *hikmah*.⁴⁷ Ibn Katsîr menyebutkan bahwa hikmah yang diterima Luqman berupa pemahaman ilmu, tuturan kata yang baik dan pemahaman agama Islam yang baik, meskipun Luqman bukan nabi dan tidak menerima waktu. Ini berarti bahwa hikmah bisa diartikan sebagai potensi yang diberikan Allah Swt kepada manusia yang harus dikembangkan untuk kemaslahatan. Kedua adalah perintah untuk bersyukur atas potensi yang telah diberikan dan dikembangkan sesuai dengan kapasitas individu masing-masing. Ketiga adalah penegasan jikalau terjadi pengingkaran terhadap karunia *hikmah* yang telah Allah Swt berikan, maka Dia menegaskan tidak rugi dari apapun yang dilakukan manusia karena Allah Maha Kaya. Yang ketiga ini menegaskan konsekuensi dari pengingkaran (*kafir*) terhadap nikmat Allah Swt akan ditanggung manusia sendiri.

Pemberian Allah Swt atas manusia berupa *hikmah* menunjukkan adanya orientasi kemerdekaan jiwa dan pengembangan potensi diri individu siswa secara bebas. *Hikmah* yang berupa potensi bawaan, seperti bakat, talenta, kemampuan fisik, akal, seni, relasional dan sebagainya, adalah *fitriah* manusia yang akan berkembang sesuai dengan proses pendidikan dan lingkungan

⁴⁷ Ibn Katsîr, *Tafsîr al-Qur‘ân al-‘Azîm*, vol. 1 dan 11 (Yaman: Maktabah Aulâd al-Syaikh li al-Turâts, 2000), 52.

yang mereka (siswa) terima. Karena itu konteks perintah bersyukur adalah mengembangkan kemerdekaan jiwa anak sesuai dengan potensi *fitrah* tersebut untuk melahirkan manusia yang seutuhnya. Pengertian “manusia seutuhnya” di sini berarti mengembangkan seluruh aspek pribadinya, yaitu iman dan takwa kepada Tuhan, budi pekerti yang luhur, penguasaan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Potensi *fitrah* tersebut tidak akan berkembang jika tidak didorong dan dibimbing melalui pendidikan yang memerdekakan.

Perintah bersyukur yang diberikan kepada manusia setelah diberi *hikmah* berupa akal, kemampuan, potensi dan ilmu dengan berbagai cara tersebut merupakan kewajiban individu. Sebab pemberian model *hikmah* yang diterima oleh semua orang bisa berbeda-beda. Sehingga konsep syukurnya pun bisa berbeda-beda. Konsep syukur yang dimaksud adalah bukan saja dengan mengucap *alhamdulillah*, namun sebagai bukti syukur atas apa yang diberikan oleh Allah Swt (pemberian *hikmah* tersebut) individu yang diberi *hikmah* tersebut harus mengoptimalkan potensinya, akal, ilmu, bakat, sikap konsistensi dan integritas,⁴⁸ tersebut untuk kebermanfaatan pribadi, yang diimbangi kebermanfaatan untuk masyarakatnya dan kebermanfaatan untuk bangsa negara. Makna syukur sebagai sebuah tanggung jawab kepada diri sendiri adalah aktualisasi kebermanfaatan atas *hikmah* yang telah diberikan Allah Swt.

Ayat ini diambil sebagai sebuah tanggung jawab pribadi, disebabkan karunia Allah Swt atas diri individu yang kemudian harus dipertanggungjawabkan oleh pribadi individu. Bentuk pertanggungjawaban yang kemudian akan kembali kepada diri individu itu sendiri (*yasykuru linafsihí*). Sementara pengingkaran terhadap kewajiban bersyukur juga akan kembali kepada diri individu penerima *hikmah*. Dimana Allah Swt menegaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan apapun dari manusia karena Dia adalah Maha Kaya.

⁴⁸ Jalâl al-Dîn al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn al-Suyutî, *Tafsîr Jalalain* (Pekalongan: Rajamurah, tt), 339.

Perintah bersyukur juga berkaitan dengan larangan mengeluh (QS. al-Ma'arij: 19-21). Ini menunjukkan potensi yang telah diberikan oleh Allah Swt (akal, budi dan fisik) adalah alat yang diberikan Allah Swt kepada individu untuk menaklukkan segala tantangan yang dihadapinya. Dengan potensi yang dimilikinya tersebut, individu berusaha untuk menaklukkan segala tantangan dan rintangan yang dihadapinya.

Pilar ketiga dari tujuan pendidikan Islam adalah menumbuhkan dan pengembangan tanggung jawab kepada masyarakat, termasuk kepada bangsa dan negara. Dalam konteks yang sederhana, tanggung jawab kepada masyarakat ini berkaitan dengan *hub min an-nass*. QS. al-Nisa: 36 jelas memberikan sebuah perintah kepada manusia untuk berbuat baik kepada semua manusia tanpa melihat latar belakang agama, suku, ekonomi, sosial, kaya-miskin, besar kecil atau jauh dekat. Ayat ini memerintahkan perbuatan baik secara pertama kali harus dilakukan kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga tanpa membedakan status sosial, agama, suku atau paham. Perintah ini bersifat universal dan menjadi bagian dari tanggung jawab manusia sebagai masyarakat dalam hal memelihara serta memperhatikan anak yatim, fakir miskin serta menjaga hubungan baik serta saling tolong menolong dengan sesama, terutama dengan tetangga. Itulah tanggung jawab manusia sebagai anggota masyarakat.

Ayat ini tidak hanya berkaitan dengan kewajiban untuk menyembah Allah Swt dan berbuat baik kepada orangtua, kerabat, perhatian terhadap anak yatim, tetangga dan masyarakat secara keseluruhan. Bahkan Allah menegaskan “stigma” bagi orang yang tidak melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat ini dengan julukan “pendusta agama” dalam QS. al-Maún. Ini menunjukkan bahwa keberagamaan seseorang tidak akan utuh ketika yang bersangkutan tidak memiliki kepekaan sosial terhadap lingkungannya. QS. al-Maún menempatkan kepekaan sosial kepada masyarakat terlebih dahulu baru kemudian, menempatkan *haq Allah* setelah kewajiban sosial seorang yang menamakan dirinya beragama. Dalam ayat-ayat lain yang berkaitan dengan keimanan selalu dikaitkan dengan *ámil al-shálihát*. Ini juga menunjukkan bahwa keimanan yang tidak dibarengi dengan

kesalehan sosial maka tidak akan sempurna keimanannya. Ada banyak hadits Nabi Muhammad Saw yang menunjukkan keterkaitan antara keimanan dan kesalehan sosial.

Pilar keempat tanggung jawab menegakkan keadilan didasarkan atas QS. al-Nisâ': 58. Ayat ini juga senada dengan QS. al-Maidah: 8 yang menegaskan sebuah perintah untuk menjadi bagian dari penegakkan keadilan, kesetaraan, menumbuhkan sikap *tawasuth*, *tawazun*, *tasammuh*, penegakkan hukum, pengelolaan kehidupan sosial-politik (kewarganegaraan) dan hubungan sosial-ekonomi kemasyarakatan. Termasuk dalam pilar keempat ini adalah memiliki kemampuan untuk menjaga *ukhuwah wathaniyah*, *insyaniyah*, *islamiyah*, menegakkan keadilan, kesetaraan, pengelolaan sosial politik, hukum dan ekonomi yang berkeadilan.

Pilar kelima adalah menumbuhkan tanggung jawab kepada alam dan lingkungan (*hab min alam*). QS. al-Rûm: 41 menjadi dasar pijakan tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang ditiptikan, bukan diwariskan, kepada manusia. Artinya pengelolaan sumber daya alam yang ada menuntut tanggung jawab kebermanfaatan dan pemanfaatannya untuk kesejahteraan umat manusia. Tidak ada monopoli oleh seorang pun terhadap SDA tersebut, sebagaimana tercantum dalam QS. al-Hasyr: 7. Inilah yang kemudian disebut *hifz bi al biah*.

Kerusakan SDA dan kerakusan ekonomi adalah gambaran krisis spiritual manusia modern. Menurut Syed Husein Nasr, kerusakan ekologi lingkungan lebih disebabkan krisis spiritual manusia modern serta manusia modern sedang "memperkosakan" setiap inci alam, demi untuk memenuhi keserakahan mereka yang tidak pernah terpuaskan. Keserakahan dan ketidadaaan tanggung jawab terhadap alam tersebut, menurut Nasr, diakibatkan krisis identitas dan krisis spiritual. Setiap manusia modern yang tidak menghargai alam, *nature*-nya menunjukkan keterputusan dirinya dengan agama dan spiritualitas dari agama yang dianutnya.⁴⁹

Tanggung jawab kepada Allah Swt dan kepada diri sendiri adalah termasuk dalam kesalehan spiritual. Sementara tanggung

⁴⁹ Yusno Abdullah Otta, "Krisis Manusia Modern Perspektif Nasr," Disertasi tidak diterbitkan (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012), 69-76.

jawab kepada masyarakat, tanggung jawab menegakkan keadilan dan tanggung jawab kepada alam dan lingkungan adalah bagian dari kesalehan sosial. Kelima tanggung jawab tersebut dalam konteks pendidikan juga linier dengan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yaitu olah hati, olah pikir, olah rasa, olah karsa dan olah raga.

Lima tujuan di atas merupakan hasil analisis dari berbagai kajian literatur al-Qur'an. Sementara tujuan dalam pendidikan Islam menurut Muhammad Omar al-Taumy al-Syaibani, yang dikutip Jalaludin Rahmat, menjelaskan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk menguatkan nilai-nilai akhlak sehingga mencapai tingkat *akhlaq al-karimah*.⁵⁰ Konsep akhlak ini menunjukkan bahwa akhlak adalah tujuan utama dari sebuah proses pendidikan. Gambaran *akhlaq al-karimah* adalah sebagai objek yang bisa disebutkan sebagai hasil dari proses pendidikan.

Armai Arief mengartikan pendidikan sebagai upaya yang dilakukan untuk membimbing anak-anak yang dilakukan secara sadar agar mereka berguna bagi dirinya dan masyarakat.⁵¹ Pendidikan Islam adalah bimbingan terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik (murid) menuju terbentuknya manusia sempurna (*insan kamil*) yang didasarkan atas nilai-nilai dan ajaran Islam yang berhubungan dengan pencipta (*Khaliq*), alam semesta, manusia, masyarakat, akhlak dan ilmu pengetahuan.⁵² Itulah yang dimaksud dengan pendidikan Islam.⁵³ Sementara Dede Rosyada menjelaskan bahwa pendidikan agama mengukuhkan pembentukan akhlak dalam kepribadian peserta didik. Materi-materi atau isu-isu yang ada dalam pendidikan agama seperti fiqih, sejarah, aqidah, tauhid hanya menjadi bagian dari penguatan pembentukan kepribadian siswa. Yang harus dikuatkan adalah pembelajaran humanisme dan akidah dalam setiap proses pendidikan dengan berbagai isu.⁵⁴

⁵⁰ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), 92.

⁵¹ Armai Arief, *Reformulasi Pendidikan Islam* (Jakarta: CRSD Press, 2005), 15.

⁵² M. Rusli Karim, "Hakekat Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia," dalam Ahmad Busyairi dan Azharuddin Sahid, *Tantangan Pendidikan Islam* (Yogyakarta: LPM UII, 1987), 14.

⁵³ Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 234.

⁵⁴ Dede Rosyada, *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah* (Jakarta: Kencana, 2017).

Akhlak sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan harus lebih jelas. Tidak sekedar sebuah jargon ber-*akhlaq al-karimah*. Pendidikan seharusnya menekankan adanya target konkrit yang bisa dikejar dan dilihat perkembangannya dari sebuah proses pendidikan Islam melalui keempat pilar tujuan pendidikan Islam. Kenapa kita harus menekankan kepada penguasaan atau penanaman, penumbuhan dan pengembangan melalui lima sikap tanggung jawab seperti di atas? Karena bentuk sikap tanggung jawab adalah konkrit dari salah satu sebuah bentuk akhlak. Dipilihnya empat sikap tanggungjawab adalah bagian dari perintah Allah Swt sendiri yang tersirat dalam QS. al-Zariyah: 56, QS. Luqman: 12, QS. al-Nisa: 36, QS. al-Maidah: 8 dan QS. al-Rûm: 41. Tanggung jawab adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan. Pendidikanlah yang berkewajiban mengantarkan siswa tersebut mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya.

Tanggung jawab adalah salah satu dari bagian akhlak. Menanamkan sejak dini sikap tanggung jawab akan menumbuhkan kepekaan terhadap lahirnya sikap-sikap positif lainnya. Penekanan terhadap adanya tanggung jawab menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada memiliki konsekuensi yang harus dihadapi dan ditanggung oleh individu dan akan berakibat kepada individu dan masyarakat serta lingkungannya.

Objek yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam adalah individu dimana kelima tujuan pendidikan Islam ini menjadi fokus capaiannya, yaitu “terlahirnya” individu yang memiliki orientasi kepada Sang Khalik, bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, berorientasi kemaslahatan atau kebermanfaatan untuk masyarakat, peka terhadap keadilan dan memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Kebermanfaatan tersebut adalah kegunaan dari pendidikan yang memiliki nilai spiritual dan sosial-ibadah. Inilah yang membedakan orientasi atau ideologi pendidikan Islam dengan ideologi kapitalis atau Marxis.

Orientasi kepada individu dalam pendidikan juga tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu melahirkan manusia Indonesia yang cerdas, bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki pengendalian diri

serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya. Dalam konteks ini tujuan pendidikan dalam orientasi individu adalah melahirkan manusia beradab. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari pendidikan Islam, melahirkan manusia yang beradab, sebagaimana tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad Saw yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Konsep *ta'dib*, *tarbiyah* dan *ta'lim* digunakan dalam kerangka menanamkan lima sikap tanggung jawab sebagai tujuan pendidikan Islam. Kelima metode ini digunakan sesuai dengan fokus yang akan ditekankan dalam proses pendidikan. *Ta'dib* berkaitan dengan landasan filsafat dan akhlak⁵⁵ atau juga ranah *afektif*, *tarbiyah* terkait dalam pembiasaan dan penguatan keterampilan atau ranah *psikomotor*, sementara *ta'lim* adalah penguasaan pengetahuan atau *knowledge*, dan basis teoritis. Penulis tidak menghadapkan ketiga istilah tersebut sebagai sesuatu yang berdiri sendiri dan ketiganya saling melengkapi.⁵⁶

Kata *ta'dib* diambil dari pernyataan Rasulullah Saw, “*Tuhanku telah mendidikkmu (addaba), dengan demikian membuat pendidikanku (ta'dib) yang paling baik*” (HR. Ibn Hibban), yang kemudian dimaknai oleh Naquib al-Attas dengan *ta'dib*. Syed Naquib al-Attas menggunakan istilah *ta'dib*, sebagai konsep yang lebih sesuai dengan pendidikan Islam. Dalam penjelasannya, kata *ta'dib* sebagaimana yang menjadi pilihan al-Attas, merupakan kata yang berasal dari kata *addaba* yang berarti memberi adab, atau mendidik.⁵⁷ Makna *ta'dib* dalam terminologi al-Attas berarti penanaman *adab* pada setiap peserta didik dalam proses pendidikan. *Adab* merupakan suatu substansi yang semestinya ditanamkan dalam proses pendidikan Islam. Mengenai adab dalam konteks ini, al-Attas mendefinisikan *adab* sebagai potensi seseorang yang berkaitan dengan hakikat serta dengan kapasitas dan potensi jasmaniah, intelektual serta ruhaniah seseorang yang bersifat teratur secara hirarkis.

⁵⁵ George F. Kneller, *Introduction to The Philosophy of Education* (New York: John Wiler & Sons Inc, 1971).

⁵⁶ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, 72-73.

⁵⁷ Muhammad Naquib Al-Attas, *Aims and Objectives of Islamic Education* (Mekah: King Abdulaziz University, 1979), 20.

Al-Attas menolak istilah *tarbiyah*. Kata *tarbiyah* dalam pengertian ini masih bersifat generik dan mengandung unsur pendidikan yang bersifat fisik dan material. Ini berarti *tarbiyah* mengandung unsur pendidikan untuk semua makhluk hidup, bahkan tumbuhan pun ikut masuk di dalamnya. Lebih lanjut, Al-Attas menjelaskan bahwa perbedaan antara *ta'dib* dan *tarbiyah* adalah terletak pada makna substansinya. *Tarbiyah* lebih menonjolkan pada aspek kasih sayang (*rahmah*), sementara *ta'dib*, selain dimensi *rahmah*, juga bertitik tolak pada aspek ilmu pengetahuan. Secara mendasar, dia mengakui bahwa dengan konsep *ta'dib*, pendidikan Islam berarti mencakup seluruh unsur-unsur pengetahuan, pengajaran dan pengasuhan yang baik. Di luar istilah *ta'dib*, karena itu, bagi al-Attas tidak perlu dipakai.⁵⁸ Menurut al-Attas, hakikat pendidikan Islam adalah *ta'dib*, yang dalam istilah tersebut sudah termasuk *tarbiyah* atau *ta'lim*. Menurut al-Attas, *ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan (*'ilm*), pengajaran (*ta'lim*) dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). Dengan demikian tujuan pendidikan Islam menurut pemikiran Naquib al-Attas adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam diri setiap manusia. Sedangkan tujuan akhir pendidikan Islam bertujuan untuk menghasilkan manusia (individu) yang baik, secara materiil dan spiritual.

Artikel ini tidak mendikotomikan pengertian *ta'dib* dan *tarbiyah* secara berhadapan-hadapan. Justru masing-masing secara konseptual memiliki perannya masing-masing. *Ta'dib* berada pada tataran filosofis dan pembentukan akhlak secara keseluruhan. *Ta'dib* mendasari pendidikan secara filosofis dan tujuan pendidikan untuk melahirkan individu yang beradab dan berakhlak. Sementara konsep *tarbiyah* digunakan sebagai metodologi untuk menguatkan penanaman akhlak dan spiritual melalui bimbingan, pembiasaan dan penguatan keterampilan (fisik maupun akal) dalam implementasi spiritual dan akhlak. Sebab sebuah sikap tidak akan muncul jika tidak dibiasakan. Atau sebaliknya akhlak muncul karena sesuatu yang telah dilakukan secara *continue* (sikap yang terbiasa dilakukan secara terus-menerus). Makna dasar *tarbiyah* adalah

⁵⁸ Muhammad Naquib al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1999), 125.

pengasuhan yang baik dengan penuh kasih sayang dalam jangka waktu yang lama. Penguatan akhlak melalui pembiasaan dan keterampilan membutuhkan pengasuhan dan kasih sayang yang tulus dan terus-menerus. Sementara *ta'lim* yang diartikan pengajaran merujuk kepada sebuah konsep transfer *knowledge* penguatan pengetahuan, teori dan konten serta substansi keilmuan. Sehingga baik *ta'dib*, *tarbiyah* maupun *ta'lim* adalah satu kesatuan yang utuh. Dalam konteks bahasa memang pendidikan Islam sering diidentikan dengan istilah *tarbiyah al-islamiyah*.

Setelah dibahas terkait ideologi Islam dalam pendidikan, lalu apakah ideologi pendidikan Islam memiliki konsep seperti *protestan ethic*? Yaitu konsep *calling* yang kemudian dinamakan *Calvinisme* yang menjadikan etos kerja kaum *Calvinis* (Protestan) begitu besar dalam menguasai kehidupan perekonomian. Dalam konsep *Calvinisme*, “keterpanggilan” hanya diberikan kepada orang-orang terpilih. Dan untuk menjadi orang “terpilih” harus diwujudkan dalam kerja nyata.⁵⁹

Penguatan etos kerja, dalam Islam, adalah sangat banyak baik dalam hadits maupun ayat al-Qur'an. Dalam konteks tertentu konsep bekerja dalam Islam lebih dikenal dengan *ámal* atau *ámalíyah*. Terdapat 602 kali kata bentukan *'amila* dengan berbagai derivasinya dalam al-Qur'an. Kata *'amila* ini sesuai konteks ayat yang melingkupinya memiliki makna atau berkaitan dengan manusia, keimanan, amal shaleh, kemaslahatan, hukum maupun pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini menunjukkan bahwa dari seringnya penyebutan kata *'amila* menunjukkan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berupaya bekerja keras dalam setiap lapangan kehidupan untuk memperoleh hasil kerja yang maksimal.⁶⁰

Dasar etos kerja dalam Islam cukuplah banyak. Dalam kerangka menunjukkan eksistensi dan potensi kemanusiaannya dalam mengembangkan dan mengelola alam sebagai sebuah “titipan” serta pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi,

⁵⁹ Taufik Abdullah, *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi* (Jakarta: LP3ES, 1993), 8.

⁶⁰ Baqî, *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an* (Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyah, 1967), 34.

sekaligus mengelola dalam kerangka ibadah, Islam memberikan dasar spiritual untuk membangun etos kerja. Salah satunya adalah QS. al-Qasas: 77 dan QS. al-Jumu'ah: 10. Ayat ini juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Saw: *bekerjalah kamu untuk duniamu, seakan-akan kamu akan hidup selamanya dan bekerjalah untuk akhiratmu, seakan-akan kamu akan mati esok hari.*⁶¹ Meskipun hadits ini termasuk *hadits mauquf*,⁶² namun hadits ini jika ditafsirkan dalam konteks “keseimbangan” menunjukkan adanya keseimbangan antara kerja *duniawi* dan kerja *ukhrawi*. Meskipun banyak pakar menyebutkan hadits ini kecenderungan mengejar dunia lebih besar. Perintah aktualisasi manusia melalui “kerja” menjadikan Islam memiliki konsep etos kerja yang mapan seperti pada QS. al-Qasas: 77.

Meskipun hal ini tidak menjadi sebuah doktrin agama yang kuat, justru konsep mementingkan dunia akhirat menjadi doktrin yang dominan. Konsep kerja dan pentingnya etos kerja lainnya adalah konsep *khairu al-annass anfauhum li annass*, artinya sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat untuk kemanusiaan, dimanapun, kapanpun dan dengan siapapun tanpa diskriminasi. Kebermanfaatan untuk sesama adalah yang terbaik menjadi konsep perwujudan tugas ke-*khalifah*-an manusia di muka bumi.

Konsep kebermanfaatan ini seharusnya menjadi pemicu tumbuhnya etos kerja bagi umat muslim untuk mendedikasikan kehidupannya, karyanya, profesinya, kedudukannya dan pada kondisi apapun untuk siapapun dan dimanapun. Landasan kebermanfaatan hidup seorang muslim ini adalah sebagai manifestasi dari kewajibannya untuk beribadah kepada Allah Swt dan perwujudan ikrarnya kepada Allah Swt, *inná shalátí wa nusukí wa mahyáya wamamatí li Allah al rabbi al alamín*. Sebuah pernyataan ketundukan dan sumpah dari manusia kepada Allah Swt yang mendedikasikan seluruh aktivitas kehidupannya hanya untuk-Nya, meskipun dalam tataran implementasi ikrar ini setiap muslim berbeda kadar dan kualitas implementasinya.

⁶¹ Nasir al-Dîn al-Albanî, *Silsilah al-Ahadits al-Da'if wa al-Maudu'ah* (Riyad: Maktabah al-Ma'rif, 1992), 63.

⁶² Ali Mustafa Yaqub, *Hadits-Hadits Bermasalah* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), 56.

Penutup

Pendidikan tidak bisa lepas dari ideologi. Apapun model pendidikannya selalu memiliki muatan ideologis. Atau sebaliknya siapapun penguasa yang menjalankan sebuah pemerintahan, akan selalu menanamkan ideologi dalam sistem pendidikan yang dijalankannya. Pendidikan sebagai alat untuk melanggengkan sebuah ideologi jelas menjadi bagian dari proses perubahan sosial.

Ideologi didefinisikan sebagai kata yang merujuk kepada sebuah landasan berpikir individu atau kelompok orang yang menjadi dasar atau argumentasi dalam perilaku kehidupan sosialnya. Ideologi juga bisa menunjukkan sebuah cara pandang seseorang atau sekelompok orang dalam memahami realitas sosial.

Warna ideologi dalam pendidikan yang didasarkan atas dua pandangan perspektif sistem formal dan perspektif proses empiris, melahirkan klasifikasi ideologi pendidikan. Terdapat tiga klasifikasi ideologi dalam pendidikan, yaitu dikotomis, trikotomis dan enam kelompok. Klasifikasi dikotomis meliputi ideologi pendidikan konservatif dan liberal, atau realistik dan idealistik. Klasifikasi trikotomis meliputi ideologi pendidikan tradisional, progresif dan radikal atau konservatif, liberal dan kritis. Sementara yang enam kelompok adalah ideologi fundamentalisme, intelektualisme, konservatisme, liberalisme, liberasionisme dan anarkhisme (radikalisme).

Ideologi pendidikan dalam Islam lebih mengutamakan individu sebagai fokus utama. Ini didasari atas pentingnya pendidikan untuk membangun jiwa, akal dan ketakwaan. Dalam al-Qur'an sendiri banyak ayat yang menantang manusia secara individu untuk merenungkan terkait ciptaan Allah Swt. Tujuan pendidikan dalam Islam difokuskan kepada kemampuan individu untuk mampu bertanggungjawab kepada lima hal, yaitu tanggung jawab kepada Allah Swt, tanggung jawab kepada dirinya sendiri, tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab untuk berbuat dan menegakkan keadilan serta tanggung jawab kepada alam lingkungan.

Orientasi kepada individu dalam pendidikan juga tergambar dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Dalam konteks ini tujuan pendidikan dalam orientasi individu adalah melahirkan manusia beradab. Hal inilah yang menjadi salah satu tujuan dari pendidikan Islam, melahirkan manusia yang beradab, sebagaimana tujuan dari diutusnya Nabi Muhammad Saw. Konsep *ta'dib*, *tarbiyah* dan *ta'lim* digunakan dalam kerangka menanamkan lima sikap tanggung jawab sebagai tujuan pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. *Agama Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi*. Jakarta: LP3ES, 1993.
- Adiwijaya, Dominique Rio. "Semiologi, Strukturalisme, Post-Strukturalisme dan Kajian Desain Komunikasi Visual?" *Jurnal Humaniora*, Vol. 2 No. 1 (2011).
- al-Albanî, Nasir al-Dîn. *Silsilah al-Ahadits al-Da'if wa al-Maudu'ah*. Riyad: Maktabah al-Ma'rif, 1992.
- Arief, Armai. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Jakarta: CRS Press, 2005.
- al-Attas, Muhammad Naquib. *Aims and Objectives of Islamic Education*. Mekah: King Abdulaziz University, 1979.
- _____. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1999.
- Baqî. *Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an*. Kairo: Dâr al-Kutub al-Misriyah, 1967.
- Bastian, Indra dan Olivia Idrus. "Paradigma Baru Manajemen Pendidikan." *Modul Akutansi Pendidikan*.
- Bisri, Adib dan Munawwir A. Fatah. *Al-Bisri, Kamus Indonesia-Arab Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.
- Bowles, Samuel. "Capitalist Development and Education Structure," *World Development*, Vol. 6 No. 6 (1978).
- Daud, Wan Mohd Nor Wan. *Filsafat dan Praktik Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas*. Jakarta: Mizan, 1998.
- Dijk, Teun A. Van. *Ideologi a Multidiciplinary Approach*. London: SAGE Publication, 1998.
- Dore, Ronald. *The Diploma Disease*. London, Goerge Allen, 1976.
- Fisip Universitas Airlangga. "Ideologi-Ideologi dalam Pendidikan", web.unair.ac.id/admin/file/f_32373_sospen8.pptx 24/08/2018.
- Gamson, William A. "Political Discourse and Collective Action," dalam B. Klandermans, H. Kriesi dan S. Tarrow ed., *From Structure to Action: Comparing Sosial Movements Across Kultures*. Greenwich, CT: International Sosial Movement Research, JAI Press, 1988.

- Heywood, Andrew. *Political Ideologies: An Introduction*. London: Palgrave, 2011.
- Ihsan, A. Bakir. "Harga Ideologi Ditengah Pasar Globalisasi", <http://bakir.blogspot.com/2006/06/opini-harga-ideologi-di-tengah-pasar.html> 26/08/2018.
- Jalâl al-Dîn al-Mahallî dan Jalâl al-Dîn al-Suyutî. *Tafsîr Jalalain*. Pekalongan: Rajamurah, tt.
- Jalaluddin. *Teologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2003.
- Karim, M. Rusli. "Hakekat Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia," dalam Ahmad Busyairi dan Azharuddin Sahid. *Tantangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: LPM UII, 1987.
- Katsîr, Ibn. *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, Vol. 1 dan 11. Yaman: Maktabah Aulâd al-Syaikh li al-Turâts, 2000.
- Khalian. "Meninjau Kembali Ideologi dan Paradigma Pendidikan Nasional," <http://khalian21.blogspot.com/2010/11/meninjau-kembali-ideologi-dan-paradigma.html>, 24/08/2018.
- Kinloch, Graham C. *Ideology and the Sosial Science*. London: Greenwood Press, 1981.
- Kirylo, James D. *A Critical Pedagogy of Resistance*. Rotterdam: Sense Publisher, 2013.
- Kneller, George F. *Introduction to The Philosophy of Education*. New York: John Wiler & Sons Inc, 1971.
- Laclau, Ernesto. *Political and Ideology in Marxist Theory*. London: NLB, 1977.
- Litzer, George dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi dari Klasik hingga Post Modern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012.
- Maksum, Ali dan Luluk Yunan Ruhendi. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post-Modern*. Yogyakarta: Ircisod, 2004.
- Muasomah, Luluk. "Relasi Ideologi dan Pendidikan," *al-Mabsut*, Vol. 6 No. 1 (2013).
- Naisbitt, John dan Patricia Aburdence. *Megatrend 2000*. London: Sidwick, 1990.

- O'Neill, William F. *Ideologi-Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____. *Educational Ideologies*. California: Goodyear Publishing Company, 1981.
- Otta, Yusno Abdullah. "Krisis Manusia Modern Perspektif Nasr." Disertasi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2012.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary*. Oxford: Oxford University Press, 1992.
- Pratt, David. *Curriculum Planning*. Fort Worth: Brace College, 1994.
- Rijono, Nanang. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Malang: Unmer, 2003.
- Rosyada, Dede. *Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Dinamika Pendidikan Islam di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Saparudin. "Ideologi Pendidikan Dalam Pendidikan: Diseminasi dan Kontestasi pada Madrasah dan Sekolah Islam di Lombok." Disertasi tidak diterbitkan. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Shariati, Ali. *Culture and Ideology*. Texas: Free Islamic Literature, 1980.
- _____. *Man and Islam*. Texas: Free Islamic Literature, 1981.
- _____. *Tugas Cendekiawan Muslim*. Yogyakarta: Salahuddin Press, 1982.
- Shusterman, Richard. *Bourdieu: A Critical Reader*. Oxford: Blackwell Publishers, 1999.
- Soeharto, Karti. "Perdebatan Ideologi Pendidikan." *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, Vol. 14 No. 2, (2010).
- Suseno, Frans Magnis. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Syam, Firdaus. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Thompson, John B. *Analisis Ideologi*. Yogyakarta: Ircisod, 2003.

- Tilaar, HAR. *Kekuasaan dan Pendidikan*. Magelang: Indonesia Tera, 2003.
- _____. *Perubahan Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- _____. *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- _____. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- _____. *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Tucker, Kenneth H. "Ideological and Sosial Movements: The Contributions of Habermas," *Sociological Inquiry*, Vol. 59, No. 1 (1989).
- Watt, William Montgomery. *Islam and Integration of Society*. London: Routledge & Kegan, 1961.
- Webster, Merriam. *Webster's Complete Dictionar*. New York: Smith & Clark, 1995.
- Yaqub, Ali Mustafa. *Hadits-Hadits Bermasalah*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008.